BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Partisipasi Masyarakat

Terbentuknya suatu organisasi atau kelompok sosial masyarakat tidak terlepas akan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dapat tercapai jika terdapat dukungan dan keterlibatan aktif dari setiap anggota baik secara fisik maupun emosional. Keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan merupakan bentuk partisipasi yang ditunjukkan oleh individu tersebut, yang diharapkan mampu memberikan manfaat atas keikutsertaannya dalam organisasi.

Secara etimologi partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dan *capere*, yang berarti mengambil sehingga diartikan “mengambil bagian”. Menurut Keith Davis dalam (Sastropetro, 1995) partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab di dalamnya.

Soemarto (2013) menyatakan partisipasi adalah keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengambil bagian untuk bersama-sama dengan pemerintah menyukseskan program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat secara umum. Sedangkan Sumaryadi dalam Guhuhuku et al., (2019) menjelaskan partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk tindakan, dengan memberikan input seperti: ide, tenaga, waktu, keahlian, modal (materi) dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Cohen dan Uphoff dalam Ndraha (1990) menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dalam beberapa tahapan yakni tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap menikmati hasil. Pada penelitian Indriani et al., (2021) dijelaskan mengenai tahapan partisipasi berdasarkan teori Cohen dan Uphoff, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap pengambilan keputusan (perencanaan), yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat. Proses pengambilan keputusan (perencanaan) bermaksud untuk melihat sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memberikan penilaian dan menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Partisipasi pada tahap perencanaan ini dilihat dari kehadiran rapat, disikusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Proses perencanaan akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program yang telah disepakati bersama.
- 2) Tahap pelaksanaan, merupakan tahapan terpenting dalam pembangunan masyarakat, karena inti dari pembangunan ialah pada tahap pelaksanaannya. Uphoff menegaskan bahwa wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi dan berbentuk tindakan sebagai anggota kegiatan.
- 3) Tahap evaluasi dan menikmati hasil. Melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti kegiatan tersebut berhasil mengenai sasaran. Pada tahapan ini masyarakat sudah mampu merasakan keberhasilan dari program yang telah mereka lakukan. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang diberikan masyarakat, mereka memberi saran demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi berhubungan dengan faktor internal dan eksternal. Menurut Suroso et al., (2014) faktor internal mencakup karakteristik individu yaitu umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan lamanya seseorang tinggal di wilayah tersebut. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan tingkat komunikasi serta pengaruh dari tokoh masyarakat.

Namun dalam suatu organisasi masyarakat peran aktif dari anggota tidak hanya didasarkan oleh faktor internal dan eksternal saja namun terdapat faktor pendukung lainnya seperti yang dikemukakan oleh Moenir (2016) bahwa terdapat faktor yang memengaruhi efektifitas sebuah organisasi dalam melaksanakan aktifitasnya antara lain: 1) faktor kesadaran, merupakan faktor yang mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh

suatu keyakinan. Kesadaran akan mendorong seseorang melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan. Kesadaran berfungsi sebagai acuan dasar yang akan melandasi pada perbuatan/tindakan berikutnya. 2) Faktor aturan, merupakan landasan dalam melaksanakan program kegiatan. Faktor aturan secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh dalam tindakan dan perbuatan seseorang. 3) Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Tanpa adanya sistem, prosedur, dan metode yang baik dalam suatu organisasi maka akan timbul berbagai permasalahan yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Empat faktor pendapatan, merupakan balas jasa yang diterima oleh seseorang atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan, dimana pendapatan dapat berbentuk uang atau fasilitas dalam waktu tertentu. 5) Faktor keahlian merupakan kemampuan yang diukur untuk mengetahui sejauh mana seseorang dapat melakukan pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai apa yang diharapkan. 6) Faktor sarana diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Sarana terbagi menjadi dua macam yaitu sarana kerja dan fasilitas. Sarana kerja meliputi peralatan, perlengkapan, dan alat bantu.

2. Masyarakat Peduli Api (MPA)

Menurut Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), dijelaskan MPA merupakan masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan oleh Manggala Agni, serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kelompok MPA berada di bawah kendali pihak Kecamatan dan merupakan unit pelaksana yang berada di tingkat desa.

Sunanto (2008) menguraikan bahwa kelompok peduli api (kini MPA) terbentuk di dasarkan atas keputusan hasil evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2003 yang mengakibatkan terganggunya transportasi udara khususnya di Kabupaten Kubu Raya, evaluasi tersebut melibatkan seluruh anggota pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan daerah (pusdalkarhutla). Atas dasar keputusan tersebut tim melakukan rapat untuk merespon tugas pokok dan fungsi yang

diberikan. Hasil rapat tersebut kemudian memutuskan mengusulkan pembentukan kelompok peduli api sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan yang sering terjadi.

Rekrutmen calon anggota MPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Warga Negara Indonesia; (2) masyarakat yang bertempat tinggal di desa sasaran; (3) sehat jasmani dan rohani; (4) berusia minimal 17 tahun; (5) berkelakuan baik; (6). mendaftarkan diri sebagai tenaga relawan; (7) membuat surat pernyataan sebagai tenaga relawan; dan (8) mengikuti pembekalan teknis bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2018).

Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) mempunyai tugas yaitu: a) mengadakan patroli keliling di daerah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan; b) menggerakkan dan aktif langsung apabila terjadi kebakaran; c) melaksanakan dan mengendalikan kebakaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) mempunyai fungsi: 1) mensosialisasikan kepada Masyarakat supaya waspada terhadap kebakaran; 2) melakukan patroli secara bergantian dengan jadwal yang telah ditetapkan; 3) sebagai mitra dari Masyarakat dan Pengusaha; 4) pengecekan sarana prasarana; 5) Memantau dan melaporkan *hotspot*.

3. Tinjauan Mengenai Kebakaran Lahan Gambut

Tinjauan mengenai kebakaran lahan gambut menguraikan tentang, pengertian lahan gambut, kebakaran lahan gambut, dan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

a. Lahan gambut

Lahan gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik (C-organik > 18%) dengan ketebalan ≥ 50 cm. Lahan yang ketebalan gambutnya kurang dari 50 cm disebut lahan bergambut. Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa vegetasi tumbuhan yang belum terdekomposisi sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air / anaerob yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai (Agus & Subiksa, 2008).

Beberapa ciri yang dimiliki oleh gambut yaitu : (i) memiliki tekstur yang lunak, lembek dan basah, (ii) memiliki warna gelap (cokelat tua atau cokelat kemerahan), (iii) jika diremas dengan kuat maka kandungan air yang terdapat di gambut akan ke luar,

(iv) pH yang rendah, pada lahan gambut tropis memiliki pH antara 3–4,5 (v) berat jenis/*bulk density* (BD) yang rendah ($0,1 - 0,3 \text{ g/cm}^3$) (vi) porositas yang tinggi (70–95%) (vii) nilai kapasitas tukar kation (KTK) yang tinggi dan nilai kejenuhan basa (KB) yang rendah, sehingga berakibat gambut memiliki kondisi unsur hara yang rendah, (viii) banyak terbentuk di wilayah jenuh air seperti rawa, cekungan, atau daerah pantai, (ix) dalam kondisi normalnya, lahan gambut akan selalu tergenang, (x) jika berjalan di atas lapisan gambut yang telah terdegradasi, maka pijakan seperti memantul kembali, ini diakibatkan struktur gambut yang seperti spons dan banyaknya rongga yang terdapat pada gambut (Saharjo et al., 2018).

Dalam klasifikasi tanah, tanah gambut dikenal sebagai Organosol atau Histosol. Gambut diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang yakni dari tingkat kematangan, kedalaman, kesuburan dan posisi pembentukannya. Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) fibrik, apabila bahan vegetatif aslinya masih dapat diidentifikasi atau bila diremas >75% seratnya masih tersisa, berwarna coklat; (2) hemik ialah gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan bila diremas bahan seratnya 15-75%. dan (3) saprik, gambut yang sudah melapuk lanjut dan bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, jika diremas kandungan seratnya < 15%.

Gambut dibedakan menjadi empat tipe jika dilihat dari ketebalannya, yaitu: (1) gambut dangkal dengan ketebalan $\geq 50-100 \text{ cm}$, (2) gambut sedang dengan ketebalan $\geq 100-200 \text{ cm}$, (3) gambut dalam dengan ketebalan $\geq 200-300 \text{ cm}$ dan (4) gambut sangat dalam dengan ketebalan $> 300 \text{ cm}$. Berdasarkan tingkat kesuburannya, gambut dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) eutrofik adalah gambut yang subur, kaya akan bahan mineral dan unsur hara lainnya, (2) mesotrofi adalah gambut yang agak subur, memiliki kandungan mineral yang sedang dan (3) oligotrofik adalah gambut yang tidak subur karena miskin mineral. Berdasarkan proses dan lokasi pembentukannya, gambut dibagi menjadi: (1) gambut pantai, gambut yang terbentuk dekat pantai laut dan mendapat mineral dari air laut, (2) gambut pedalaman, gambut yang terbentuk di daerah yang tidak dipengaruhi air laut tetapi hanya oleh air hujan, dan (3) gambut transisi adalah gambut yang terbentuk di antara kedua wilayah tersebut (Noor dalam Agus & Subiksa, 2008).

Gambut telah menjadi fokus dunia sejak 1990an, ketika dunia mulai menyadari bahwa sumberdaya alam ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hidrologi, sarana konservasi keanekaragaman hayati, lahan budidaya (pertanian dan perikanan), dan sumber energi, tetapi memiliki peran yang lebih besar yakni sebagai pengendali perubahan iklim global karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan cadangan karbon dunia.

b. Kebakaran Lahan Gambut

Kebakaran pada kajian ini adalah kegiatan yang menyebabkan adanya api dan atau asap pada suatu kawasan baik disengaja, seperti membakar hasil tebasan pada pembukaan lahan baru atau pembersihan lahan, maupun tidak disengaja seperti karena rambatan api dari lahan yang bersebelahan.

Limin (2006) menyatakan bahwa kedalaman lapisan gambut terbakar rata-rata 22,03 cm (variasi 0 – 42,3 cm) namun pada titik tertentu kebakaran lapisan mencapai 100 cm. Oleh karenanya proses pemadaman kebakaran pada lahan gambut tergolong sulit dan memerlukan banyak air, untuk memadamkan 1 m² lahan gambut memerlukan air sebanyak 200-400 liter. Terdapat sembilan ciri kebakaran pada lahan gambut : 1) kebakaran vegetasi di atas lapisan gambut, 2) lapisan gambut terbakar tergantung kedalaman air tanah, 3) kebakaran pada lapisan gambut sulit dipadamkan dan bertahan lama, 4) kebakaran menghasilkan asap tebal karena terjadi pembakaran tidak sempurna, 5) api dapat merambat melalui lapisan bawah walaupun vegetasi di atasnya belum terbakar atau masih segar, 6) banyak pohon tumbang dan pohon mati tetapi masih berdiri tegak, 7) terdapat vegetasi yang mudah terbakar, 8) bekas kebakaran gambut ditutupi arang, dan 9) penyemprotan air pada gambut yang sedang terbakar tidak hingga padam total, akan menyebabkan asap semakin tebal.

Kebakaran lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat (Hermawan *dalam* Putri, 2008). Dampak menurunnya kondisi lingkungan meliputi 1) perubahan kualitas fisik gambut; 2) perubahan kualitas kimia gambut; 3) menurunkan keanekaragaman hayati; 4) rusaknya siklus hidrologi; 5) gambut menyimpan cadangan karbon, apabila terjadi kebakaran lahan maka akan menjadi penyumbang emisi carbon yang berdampak pada pemanasan global. Pada bidang kesehatan, banyak masyarakat yang dilaporkan menderita penyakit infeksi saluran

pernapasan, sakit mata dan batuk sebagai akibat dari asap kebakaran. Sedangkan dampak pada aspek sosial ekonomi meliputi: 1) terganggunya kegiatan pendidikan; 2) terganggunya kegiatan transportasi; 3) terganggunya sektor pariwisata; 4) terjadinya protes dan tuntutan dari negara tetangga akibat dampak asap kebakaran; dan 5) meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

c. Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut

Purboweseso (2004) menyatakan bahwa pencegahan kebakaran di lahan gambut atau hutan gambut merupakan salah satu bagian tindakan dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Tindakan lain dalam penanggulangan kebakaran lahan gambut adalah kesiap-siagaan atau tanggap darurat, dan rehabilitasi paska kebakaran. Namun tindakan pencegahan lebih penting dan lebih baik daripada melakukan pemadaman apalagi rehabilitasi yang akan lebih sulit dan mahal. Tindakan pencegahan kebakaran lahan mempunyai tujuan antara lain: (1) mencegah kebakaran lahan gambut, (2) meminimalkan terjadinya kebakaran lahan gambut, (3) memperkecil dampak kebakaran lahan gambut, dan (4) memelihara dan menjaga sumberdaya alam dari kebakaran lahan gambut.

Dalam kajian teoritis, upaya untuk menangani karhutla ada dua macam, yaitu penanganan yang bersifat represif dan penanganan yang bersifat preventif. Penanganan kebakaran lahan yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kebakaran lahan setelah kebakaran lahan itu terjadi. Penanganan jenis ini, contohnya adalah pemadaman, proses peradilan bagi pihak-pihak yang diduga terkait dengan kebakaran hutan (secara sengaja), dan lainnya. Sementara untuk penanganan yang bersifat preventif adalah setiap usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghindarkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan, yang artinya penanganan yang bersifat preventif ini akan dilaksanakan sebelum kebakaran terjadi. Pencegahan karhutla perlu dilakukan secara terpadu dari tingkat pusat, provinsi, daerah, sampai unit kesatuan pengelolaan hutan.

Upaya preventif pencegahan kebakaran hutan dan lahan menurut UU No 45 Tahun 2004, ada kesamaan bentuk pencegahan yang dilakukan diberbagai tingkat itu, yaitu penanggungjawab di setiap tingkat harus mengupayakan berjalan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) *Mapping*, yakni pembuatan peta kerawanan lahan di wilayah teritorialnya masing-masing. Fungsi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun yang lazim digunakan adalah 3 cara yaitu (1) pemetaan daerah rawan yang dibuat berdasarkan hasil olah data dari masa lalu maupun hasil prediksi (2) pemetaan daerah rawan yang dibuat seiring dengan adanya survai desa (*Participatory Rural Appraisal*) (3) pemetaan daerah rawan dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) atau citra satelit.
- 2) Informasi, penyediaan sistem informasi kebakaran lahan. Hal ini bisa dilakukan dengan pembuatan sistem deteksi dini (*early warning system*) di setiap tingkat, baik dengan cara membuat papan reklame/poster, maupun media elektronik.
- 3) Sosialisasi pengadaan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat. Penyuluhan dimaksudkan agar menginformasikan kepada masyarakat di setiap wilayah mengenai bahaya dan dampak, serta peran aktivitas manusia yang seringkali memicu dan menyebabkan kebakaran hutan.
- 4) Standardisasi yakni pembuatan dan penggunaan SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk memudahkan tercapainya pelaksanaan program pencegahan kebakaran hutan dan lahan maupun efektivitas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, diperlukan standar yang baku dalam beberapa hal seperti; a) metode pelaporan, b) peralatan, c) metode pelatihan untuk penanganan karhutla, standardisasi ini perlu dilakukan untuk membentuk petugas penanganan kebakaran yang efisien dan efektif.
- 5) Supervisi, yakni pemantauan dan pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan, sedangkan pengawasan adalah tindak lanjut dari hasil analisis pemantauan.

Terdapat pula beberapa kebijakan dibuat pemerintah yang memuat larangan pembakaran hutan baik untuk tujuan pembukaan lahan maupun untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, sebagai berikut: Undang-Undang No 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan. Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, KUHP pasal 187, dimana isi Undang-Undang di atas menegaskan bahwa dilarangnya kegiatan pembukaan dan atau pembersihan lahan dengan cara

dibakar, apabila terdapat pelanggaran akan mendapatkan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Meski berbagai kebijakan tersebut melarang adanya pembakaran hutan dan lahan tetapi masih terdapat aturan yang memperbolehkan dilakukannya pembukaan lahan dengan cara membakar khususnya dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maksud dari pasal tersebut adalah diperbolehkannya pembakaran lahan namun dengan ketentuan pembakaran lahan hanya boleh dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

4. Teori Korelasi Rank Spearman

Analisis merupakan tindakan mengolah data hingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam menjawab masalah statistik. Dalam desain riset, perlu direncanakan dengan baik alat analisis yang akan diterapkan untuk menganalisis data. Menurut Gunawan (2017) teknik analisis apa yang akan digunakan untuk pengujian tergantung pada interaksi dua hal yaitu 1) bentuk data yang akan dianalisis dan 2) bentuk hipotesisnya. Berkaitan dengan bentuk hipotesis, dapat dibedakan menjadi tiga yakni deskriptif, komparatif dan asosiatif. Bentuk hipotesis dan teknik analisis yang sesuai disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Panduan Penggunaan Statistik Parametrik dan Non Parametrik Untuk Menguji Hipotesis

Macam Data	Deskriptif (Satu Variabel)	Bentuk Hipotesis				Korelasional (Hubungan)
		Komparatif (dua sampel)		Komparatif (> dua sampel)		
		Related	Independen	Related	Independen	
Nominal	Binomial X2 One Sample	Mc Nemar	Fisher Exact Probability X2 Two Sampel	X2 for k sample Cochran Q	X2 for k sample	Contingency Coefficient C
Ordinal	Run Test	Wilcoxon matched pairs	Mann-Whitney U test	Friedman	Kruskal-Wallis	Spearman Rank Correlation
Interval	One Sample t-test*	Paired Sample t-test*	Independen Sample t-test*	One-Way Anova* Two way-Anova*	Repeated measure Anova*	Person Product Moment*

*statistik parametrik

Sumber: (Sunyoto, 2012)

Dalam penelitian ini bentuk hipotesis yang digunakan berupa hipotesis korelasional, yang mana ingin mengetahui hubungan antara faktor X (kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, keahlian dan sarana) terhadap faktor Y (tingkat partisipasi) dengan bentuk data ordinal dan termasuk dalam kategori statistik nonparametrik.

Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi merupakan uji statistika yang mengukur keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana terdapat dua analisis korelasi yang sering digunakan yakni korelasi rank spearman dan korelasi kendall tau.

Metode korelasi rank spearman dikemukakan oleh Carles Spearman pada tahun 1904, statistik ini kadang disebut dengan *Spearman- rho*, dan dinotasikan dengan ρ . Metode ini digunakan apabila data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka metode ini dapat digunakan. Pada uji ini, nilai korelasi tidak dihitung berdasarkan nilai aktual data, melainkan melalui peringkat yang sudah diberikan pada data atau dengan kata lain korelasi ini menuntut kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal sehingga obyek-obyek penelitiannya dapat diranking dalam dua rangkaian berurut.

Sedangkan metode korelasi kendall-tau dikenalkan oleh M.G Kendall pada tahun 1938. Koefisien korelasi ini memiliki sifat yang sama dengan koefisien korelasi peringkat Spearman-rho, tetapi berbeda dasar logikanya. Jika untuk koefisien korelasi peringkat Spearman-rho didasarkan pada peringkat (rank), dimana baik variabel X dan variabel Y masing-masing dirankingkan, sedangkan untuk koefisien korelasi Kendall-tau salah satu variabelnya saja yang diberi peringkat, yaitu variabel X saja atau variabel Y saja, dalam hal ini biasanya adalah variabel X. Sedangkan variabel Y akan dilihat apakah nilai variabel Y itu searah atau berlawanan arah dengan variabel X yang sudah diurutkan. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan alat analisis korelasi rank spearman dikarenakan lebih dapat memrepresentasikan hubungan antara variabel x dan y karena data x dan y dirankingkan masing-masing.

Kuat lemahnya hubungan diukur antara jarak 0 sampai dengan 1. Korelasi mempunyai kemungkinan hipotesis dua arah (*two tailed*). Korelasi searah jika nilai koefisien korelasi ditemukan positif, sebaliknya jika nilai koefisien negatif maka korelasi tersebut tidak searah. Kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y diukur dengan nilai yang disebut koefisien korelasi. Siregar (2015) menjelaskan koefisien korelasi adalah angka atau indeks yang menyatakan keeratan hubungan antara dua

variabel atau lebih dan juga dapat menentukan arah dari kedua variabel yang disimbolkan dengan r . Nilai koefisien korelasi paling sedikit -1 dan paling besar 1 . Jika $r =$ koefisien korelasi, maka nilai r dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$-1 \leq r \leq 1$$

Dapat diartikan jika:

$r = 1$, hubungan X dan Y sempurna dan positif (mendekati 1 , yaitu hubungan sangat kuat dan positif)

$= -1$, hubungan X dan Y sempurna dan negatif

$= 0$, hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan

Untuk mencari koefisien korelasi rank spearman dirumuskan:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum di^2}{n(n^2-1)}$$

Keterangan:

r_s = nilai korelasi *Spearman*

di = selisih dari pasangan rank ke- i

n = Jumlah pasangan rank

Setelah melalui perhitungan persamaan analisis korelasi rank spearman, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan membandingkan nilai r_s hitung dengan r_s tabel pada taraf α tertentu yang dirumuskan sebagai berikut:

Jika, r_s hitung $>$ r_s tabel, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima (terdapat hubungan).

Jika, r_s hitung $\leq$ r_s tabel, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak terdapat hubungan).

Tahap berikutnya setelah melalui pengujian hipotesis dan hasilnya signifikan, (H_0 ditolak), maka untuk menentukan keamatan hubungan dapat digunakan kriteria yang dikemukakan oleh Guilford (1956) yaitu:

- a. $0,00 - 0,20$: Hubungan yang sangat lemah dan bisa diabaikan
- b. $> 0,20 - 0,40$: Hubungan yang lemah (tidak erat)
- c. $> 0,40 - 0,70$: Hubungan yang cukup erat (substansial)
- d. $> 0,70 - 0,90$: Hubungan yang erat
- e. $> 0,90 - 1,00$: Hubungan sangat erat (*very dependable relationship*)

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka yang diambil sebagai rujukan membantu peneliti untuk menentukan teori, variabel, dan metode apa yang dapat diterapkan dalam ruang lingkup penelitian yang membahas tentang partisipasi petani Masyarakat Peduli Api dalam pencegahan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Rasau Jaya. Penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian dapat dilihat pada tabel 2.

Penelitian Nurjanah et al., (2021), memiliki kesamaan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan MPA dalam penanggulangan kebakaran hutan. Penelitian Ningrum et al., (2019) memiliki kesamaan dalam lingkup tempat penelitian namun hanya mewakili satu desa yang berada di Kecamatan Rasau Jaya. Penelitian Hermanto & Yuliani (2021) membantu memberikan informasi terkait variabel yang memengaruhi dan menghambat partisipasi MPA. Penelitian Alviawati et al., (2021) memberikan informasi tentang teori partisipasi dan memberikan gambaran terkait upaya yang telah dilakukan masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan dan penelitian Darjo et al., (2021) memaparkan strategi peningkatan efektivitas MPA dalam pengendalian hutan sehingga dapat menjadi referensi dalam bab pembahasan penelitian ini.

Secara keseluruhan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada variabel yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan variabel yang dikemukakan oleh Moenir dan subjek penelitian lebih mendalam kepada petani bukan masyarakat pada umumnya.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/Tahun	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1	<i>The Role of Masyarakat Peduli Api (MPA) Communities in Forest and Land Fire Disaster Communication in Riau Province Case Study in Siak District in 2019</i> (Nurjanah et al., 2021)	Komunikasi, informasi, koordinasi dan Kerja sama yang dilakukan MPA saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan	Analisis deskriptif kualitatif yang menjabarkan hasil dari wawancara mendalam, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	MPA telah melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat dan pemerintah pada bencana kebakaran hutan dan lahan di Siak 2019, informasi yang diberikan diantaranya (1) lokasi kejadian, (2) sosialisasi mengenai mitigasi dan dampak bencana kebakaran hutan dan (3) mengadakan pelatihan dan simulasi bersama BPBD terkait mitigasi bencana dan pengenalan penggunaan alat pemadam kebakaran.
2	Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya (Ningrum et al., 2019)	<ul style="list-style-type: none"> •Tingkat pengetahuan •Tingkat kekosmopolitan •Tingkat Pendapatan 	Analisis inferensial Kendall Tau	Berdasarkan teori Arnstein tingkat partisipasi masyarakat berada pada tahap terapi. Terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan terhadap tingkat partisipasi masyarakat, sedangkan faktor kekosmopolitan dan pendapatan tidak terdapat hubungan yang signifikan.
3	Partisipasi Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Kesuma dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Hermanto & Yuliani, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Kinerja MPA Desa Kesuma dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. • Faktor penghambat MPA Desa Kesuma dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 	Analisis Kualitatif dengan pendekatan Metode eksploratif	Partisipasi MPA Desa Kesuma sudah cukup baik yang ditandai dengan menurunnya angka kebakaran hutan pada tahun 2020 karena terealisasinya tugas MPA. Terdapat faktor yang menghambat partisipasi MPA yaitu motivasi, kurangnya SDM, Keuangan serta sarana dan prasarana.

<p>4</p> <p><i>The Role of Community in Land Fire Prevention Efforts in Liang Anggang District, Banjarbaru City</i> (Alviawati et al., 2021)</p>	<p>Peran masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran lahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembersihan bahan bakar pemicu kebakaran di permukaan tanah • Waktu pembakaran • Pembuatan sekat • Pengendalian pembakaran. 	<p>Deskriptif kuantitatif</p>	<p>Kegiatan MPA masih belum sepenuhnya berfungsi karena masih sedikitnya masyarakat yang ikut bergabung. Namun masyarakat Liang Anggang telah ikut serta dalam upaya pencegahan kebakaran lahan seperti membersihkan bahan bakar pemicu kebakaran (36,33%), memperhatikan waktu pembakaran (35,33%), membuat sekat (29,67%) pembakaran dan melakukan pembakaran terkendali (6%).</p>
<p>5</p> <p>Strategi Peningkatan Efektivitas Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam Pengendalian Kebakaran Hutan di Provinsi Bali (Darjo et al., 2021)</p>	<p>Implementasi Lima kriteria Perdirjen PPI No 3 Tahun 2018 yakni: pembinaan, Organisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan pendanaan.</p>	<p>Analisis SWOT</p>	<p>Implementasi Perdirjen PPI No 3 Tahun 2018 sebesar 66,39%. Nilai tersebut menunjukkan keberadaan MPA di Provinsi Bali belum efektif dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan. Strategi peningkatan efektivitas MPA berupa S-O (<i>Strengths Opportunities</i>). Efektivitas MPA dapat ditingkatkan dengan adanya dukungan nyata melalui regulasi yang jelas, peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kapasitas SDM di tingkat tapak, serta peningkatan kegiatan pengujian di sekitar kawasan rawan.</p>

Sumber: (Nurjanah et al., 2021; Ningrum et al., 2019; Hermanto & Yuliani, 2021; Alviawati et al., 2021; Darjo et al., 2021)

C. Kerangka Konsep

Kabupaten Kubu Raya merupakan **salah satu diantara 14** Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang kerap terjadi kebakaran lahan gambut. Secara lanskap luas lahan gambut Kab. Kubu Raya mengambil porsi 60 % dari luas administratif Kab. Kubu Raya. Kebakaran lahan gambut yang terjadi hampir setiap tahun memberikan dampak besar bagi lingkungan dan kehidupan sosial. Terjadinya kebakaran tidak terlepas dari faktor alam dan kegiatan manusia di dalamnya, dimana Kecamatan Rasau Jaya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yang memiliki *hotspot* yang cukup tinggi, yang diakibatkan dari aktivitas pertanian karena sebagian besar (11%) dari total penduduknya berprofesi sebagai petani.

Kebakaran lahan yang kerap terjadi membuat Pemerintah sadar akan ketidaksanggupannya dalam menanggulangi kebakaran tanpa adanya partisipasi masyarakat di dalamnya, sehingga terbentuklah suatu kelompok masyarakat yang secara sadar, peduli dan sukarela terhadap lingkungannya dalam mencegah terjadinya bencana kebakaran, yang dikenal sebagai kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya peran sertanya dalam kegiatan pembangunan. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi petani anggota kelompok MPA tentunya terdapat faktor yang melatarbelakanginya. Tingkat partisipasi dari anggota dapat dilihat pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar. 1:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

D. Hipotesis

Diduga tingkat partisipasi terkategori tinggi dan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, keahlian dan sarana terhadap tingkat partisipasi petani anggota kelompok MPA dalam pencegahan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Rasau Jaya.